



Manifestation of Javanese Political Concept in President Soekarno's Leadership Style: A Historical-Cultural Analysis

Aldi Cahya Maulidan^{1*}, Gian Fajar Gemilang¹, Anugrah¹

*Corresponding author email: aldicahya58@upi.edu

¹Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract: *This research is motivated by the fact that Javanese political concepts have influenced Indonesian politics from the royal era to contemporary times. The concept of Javanese politics has been an integral part of the Indonesian political landscape for a long time. Rooted in the traditions of the ancient Javanese kingdoms, this concept has a deep influence on the perspective and practice of politics in the archipelago, including Soekarno. This research was conducted using a qualitative literature method with document analysis. The qualitative literature method with document analysis is a research approach that focuses on collecting and interpreting data from various written sources. This method involves systematic review of documents such as books, journal articles, reports, archives, and other written sources relevant to the research topic. The results and discussion of the research explain that the concept of Javanese politics has deep roots in traditional Javanese culture and philosophy. Soekarno, as a son of Java, was greatly influenced by these political concepts. He combined traditional Javanese elements with modern ideas of nationalism and socialism. Soekarno also adopted the Javanese concept of the leader as the "axis" or centre of political and social life in both domestic policy and international relations.*

Keywords: *Javanese Political Concepts, Soekarno, Indonesia*

Manifestasi Konsep Politik Jawa dalam Gaya Kepemimpinan Presiden Soekarno: Analisis Historis-Kultural

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi konsep politik Jawa telah memengaruhi politik Indonesia dari zaman kerajaan hingga zaman kontemporer. Konsep politik Jawa telah menjadi bagian integral dari lanskap politik Indonesia sejak lama. Berakar pada tradisi kerajaan-kerajaan Jawa kuno, konsep ini memiliki pengaruh yang mendalam terhadap cara pandang dan praktik politik di Nusantara termasuk Soekarno. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan kualitatif dengan jenis analisis dokumen. Metode kepustakaan kualitatif dengan analisis dokumen adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan interpretasi data dari berbagai sumber tertulis. Metode ini melibatkan penelaahan sistematis terhadap dokumen-dokumen seperti buku, artikel jurnal, laporan, arsip, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Hasil dan pembahasan penelitian menjelaskan bahwa konsep politik Jawa memiliki akar yang dalam pada budaya dan filosofi tradisional Jawa. Soekarno, sebagai putra Jawa, sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep politik ini. Ia menggabungkan elemen-elemen tradisional Jawa dengan ide-ide modern tentang nasionalisme dan sosialisme. Soekarno juga mengadopsi konsep Jawa tentang pemimpin sebagai "poros" atau pusat dari kehidupan politik dan sosial baik itu dalam kebijakan dalam negeri maupun dalam hubungan internasional.

Kata Kunci: Konsep Politik Jawa, Soekarno, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia dengan budaya dan sejarah yang beragam, memiliki banyak warisan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan rakyatnya, termasuk politik. Konsep politik Jawa telah memengaruhi politik Indonesia dari zaman kerajaan hingga zaman kontemporer, dan ini merupakan salah satu warisan yang paling signifikan serta terasa sampai sekarang. Nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah berkembang selama berabad-abad membentuk konsep politik Jawa. Pandangan hidup dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh orang Jawa telah membentuk cara mereka berpikir dan bertindak. Tokoh politik Indonesia, termasuk Presiden Soekarno, sangat terkena dampak ini (Agung, 1990).

Mengenai Soekarno, beliau adalah seorang pemimpin politik yang merupakan salah satu pendiri Indonesia dan presiden pertama negara ini, beberapa karya telah didedikasikan untuk mempelajari pandangan dan praktik politiknya. Di antaranya adalah Hindley. Terkait dengan tulisan mengenai Soekarno ketika masih berkuasa, Hindley menulis tentang bagaimana pandangan dan praktik politik sang presiden dalam membuka peluang bagi kaum komunis untuk memegang posisi-posisi politik yang penting (Hindley, 2013).

Sementara itu, penulis di era pasca-Soekarno, yaitu Hauswedell menjelaskan pandangan dan praktik politik Soekarno dari sudut pandang peristiwa kontroversial 1 Oktober 1965, dan pembersihan anti-komunis yang terjadi setelahnya. Kartodirdjo menulis tentang latar belakang sosial-budaya Soekarno muda. Dari perspektif yang lebih baru, Argenti membahas pandangan dan praktik politik Soekarno dari perspektif Demokrasi Terpimpin (Franklin & Hägerdal, 2024). Akan tetapi, studi-studi tersebut gagal untuk memeriksa sejauh mana latar belakang Jawa Soekarno memengaruhi pemahamannya tentang dirinya sendiri, tentang dinamika sosial-politik politik Indonesia, dan peran Indonesia (dan dirinya sendiri) dalam hubungan internasional.

Soekarno, sebagai presiden pertama Republik Indonesia, adalah figur yang sangat dipengaruhi oleh berbagai elemen budaya Jawa. Latar belakang budaya dan pendidikan yang ia terima sejak kecil membentuk pandangan politiknya yang unik. Soekarno tidak hanya memimpin dengan kekuatan dan kharismanya, tetapi juga dengan pemahaman mendalam tentang tradisi dan nilai-nilai Jawa. Konsep politik Jawa telah menjadi bagian integral dari lanskap politik Indonesia sejak lama. Berakar pada tradisi kerajaan-kerajaan

Jawa kuno, konsep ini memiliki pengaruh yang mendalam terhadap cara pandang dan praktik politik di Nusantara.

Selama kepemimpinannya, Soekarno sering menggunakan gagasan politik Jawa dalam kebijakan dan strategi politiknya. Ini ditunjukkan oleh cara ia mengelola dinamika politik dalam negeri, menjaga kesatuan nasional, dan membangun hubungan dengan rakyat. Pendekatan Soekarno ini menunjukkan kepribadian dan kekuatan budaya Jawa (Farram, 2024). "Manunggaling kawula lan gusti", yang berarti persatuan antara pemimpin dan rakyat, adalah salah satu konsep politik Jawa yang menonjol selama kepemimpinan Soekarno. Konsep ini menekankan pentingnya hubungan harmonis dan saling mendukung antara penguasa dan yang dikuasai mereka. Untuk mewujudkan prinsip ini, Soekarno mendekati diri kepada rakyat, mendengarkan keinginan mereka, dan berusaha untuk menjadi pemimpin yang dihormati dan dicintai (Carey, 1976). Dalam tradisi Jawa, kekuasaan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan terpusat. Konsep ini tercermin dalam gaya kepemimpinan Soekarno yang cenderung sentralistik dan kharismatik.

Pengaruh konsep politik Jawa dalam kepemimpinan Soekarno juga tercermin dalam upayanya untuk menjaga harmoni dan stabilitas nasional. Dalam budaya Jawa, harmoni dianggap sebagai elemen kunci dalam kehidupan sosial dan politik. Soekarno menerapkan prinsip ini dengan mengupayakan persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia (Mulyana, 2017). Penerapan konsep politik Jawa Soekarno tidak selalu berjalan lancar. Dalam beberapa situasi, prinsip-prinsip tradisional dapat bertentangan dengan keadaan politik kontemporer yang lebih kompleks dan dinamis. Seringkali, Soekarno kesulitan menggabungkan prinsip-prinsip tradisional dengan tuntutan politik modern.

Studi tentang hubungan antara konsep politik Jawa dan kepemimpinan Soekarno memberikan wawasan penting tentang dinamika politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Analisis mendalam terhadap pidato-pidato dan tulisan-tulisan Soekarno mengungkapkan bagaimana ia memadukan konsep politik Jawa dengan ide-ide modern tentang nasionalisme dan sosialisme. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ide-ide politik Jawa dan dampaknya terhadap Presiden Soekarno memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana politik Indonesia berjalan. Selain itu, hal ini meningkatkan rasa hormat kita terhadap kekayaan sejarah dan budaya yang

membentuk karakter bangsa ini. Studi politik dan budaya Indonesia akan mendapat manfaat dari penelitian lebih lanjut tentang subjek ini.

Pada konteks pendidikan saat ini, sangat penting untuk membantu para peserta didik dan generasi muda secara umum untuk dapat melihat sejarah para pemimpin politik kita (dan juga para pemimpin di bidang lain) dari latar belakang budaya atau tradisi mereka untuk dapat memahami mereka dengan lebih baik. Dengan memahami latar belakang sejarah dan budaya mereka, para peserta didik tidak hanya dapat lebih memahami pandangan dan praktik politik para pemimpin, tetapi juga dapat memberikan ide dan saran mengenai para pemimpin tersebut dengan cara yang lebih dapat diterima demi kebaikan bersama. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat membuka pintu bagi penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaruh latar belakang sejarah dan budaya terhadap para pemimpin politik, baik di masa lalu maupun masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan kualitatif dengan jenis analisis dokumen. Metode ini melibatkan penelaahan sistematis terhadap dokumen-dokumen seperti buku, artikel jurnal, laporan, arsip, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Bowen, 2009). Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau masalah penelitian melalui analisis konten dan konteks dari dokumen-dokumen tersebut.

Pada analisis dokumen, peneliti melakukan beberapa tahapan penting. *Pertama*, mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan; *kedua*, membaca dan menelaah isi dokumen; *ketiga*, mengategorikan dan mengodekan data berdasarkan tema-tema tertentu, dan *keempat*, menginterpretasikan makna dari data yang telah dikategorikan, dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya dari dokumen tersebut (Zed, 2018). Dokumen-dokumen yang diteliti untuk penelitian ini adalah pidato dan tulisan Soekarno antara lain *Di Bawah Bendera Revolusi* (1964), *Sukarno: An Autobiography as told to Cindy Adams* (1965), *Amanat Proklamasi I, 1945-1950* (1985), dan *Revolusi Belum Selesai* (2014). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut diinterpretasikan dan dianalisis dengan menggunakan teori Anderson tentang konsep kekuasaan Jawa (Anderson, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Jawa Tentang Kekuasaan dan Sudut Pandang Soekarno Tentang Dirinya Sendiri

Soekarno merupakan tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, memiliki latar belakang yang sangat kuat terkait dengan budaya Jawa. Lahir dari seorang ayah berdarah Jawa, Raden Soekemi Sosrodihardjo, dan ibu berdarah Bali, Ida Ayu Nyoman Rai, Soekarno tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai dan filosofi Jawa. Masa kecil dan remajanya yang dihabiskan di tanah Jawa, khususnya di Surabaya dan Mojokerto, memberikan fondasi yang kuat dalam pembentukan karakternya sebagai seorang pemimpin yang memahami esensi kepemimpinan Jawa.

Pengaruh tokoh-tokoh besar Jawa dalam kehidupan Soekarno sangat signifikan dalam membentuk pandangan hidupnya. Selama masa remajanya, ia berinteraksi dengan berbagai pemimpin dan cendekiawan Jawa yang memiliki pemikiran progresif namun tetap mengakar pada nilai-nilai tradisional. Salah satu tokoh yang sangat memengaruhinya adalah HOS Tjokroaminoto, yang tidak hanya menjadi guru politiknya tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana memadukan modernitas dengan kearifan Jawa. Interaksi intensif dengan para tokoh ini membentuk cara pandang Soekarno dalam memahami dan mengaplikasikan konsep kekuasaan Jawa dalam konteks modern. Konsep Jawa tentang kekuasaan berakar dalam tradisi dan budaya yang telah berkembang selama berabad-abad. Dalam pandangan Jawa, kekuasaan bukan sekadar otoritas politik atau kemampuan untuk mengendalikan orang lain, melainkan juga sebuah bentuk energi spiritual yang harus dijaga dan dihormati. Kekuasaan ini sering dianggap sebagai mandat dari kekuatan adikodrati yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan (Safitri, 2019).

Wahyu yaitu tanda atau petunjuk Tuhan yang memberikan legitimasi kepada pemimpin, adalah salah satu elemen penting dari gagasan kekuasaan Jawa. Pemimpin yang diberi wahyu dianggap dipilih dan diberkati untuk memimpin rakyatnya. Ketika berbicara tentang sejarah Jawa, raja-raja dan pemimpin besar sering digambarkan sebagai memiliki wahyu ini, yang membuat mereka menjadi penguasa yang sah. Konsep lainnya yaitu, konsep "kharisma", atau daya tarik pribadi, menjadi komponen penting dalam kekuasaan orang Jawa. Kharisma mencakup lebih dari sekadar kecerdasan atau pesona fisik, tetapi juga kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Seorang pemimpin yang kharismatik dapat membangun kepercayaan dan kesetiaan di

antara pengikutnya, ini adalah komponen penting dalam menjaga masyarakat stabil dan damai.

Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia dan proklamator kemerdekaan, beliau memiliki pemahaman yang kuat tentang dirinya sendiri. Dia sering percaya bahwa takdir telah memilihnya untuk membawa Indonesia menuju kemerdekaan dan kemajuan. Soekarno menyatakan keyakinannya bahwa dia adalah "Putra Sang Fajar", yang dilahirkan untuk membawa cahaya bagi bangsa Indonesia dalam banyak pidatonya. Soekarno memiliki kepercayaan diri yang dan daya tarik yang luar biasa. Ia memahami pengaruhnya terhadap rakyat dan menggunakan kemampuan retorikanya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebanggaan Indonesia. Soekarno sering digambarkan sebagai representasi dari perjuangan dan keinginan bangsa, dan beliau juga sering dikaitkan dengan cita-cita besar rakyat Indonesia.

Soekarno juga memandang dirinya sebagai pemersatu bangsa. Dengan latar belakang pendidikan Barat dan akar budaya Jawa, ia berusaha menjembatani berbagai elemen dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang ia cetuskan mencerminkan upayanya untuk menyatukan berbagai aliran ideologi. Soekarno sebagai orator ulung, sehingga beliau memandang dirinya sebagai pendidik massa. Ia percaya bahwa tugasnya adalah membangkitkan semangat nasionalisme dan revolusi di kalangan rakyat Indonesia. Pidato-pidatonya yang berapi-api dan penuh retorika menjadi ciri khas kepemimpinannya.

Konsep Jawa yang tertanam dalam diri Soekarno tercermin jelas dalam gaya kepemimpinannya sebagai presiden pertama Indonesia. Ia mengadopsi filosofi kepemimpinan Jawa seperti "*ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*" (di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan) dalam memimpin bangsa. Soekarno juga sering menggunakan simbolisme dan metafora Jawa dalam pidato-pidatonya, menunjukkan bagaimana nilai-nilai Jawa telah terinternalisasi dalam pemikirannya dan menjadi bagian integral dari cara ia memandang dan memimpin bangsa.

Pandangan Soekarno tentang dirinya sendiri juga tidak lepas dari kritik. Beberapa pengamat melihat adanya unsur narsisisme dalam gaya kepemimpinannya. Kecenderungannya untuk membangun kultus individu dan gelar Pemimpin Besar Revolusi yang disandangnya mencerminkan aspek tersebut. Terlepas dari kontroversi, cara Soekarno memandang dirinya sendiri sangat memengaruhi gaya kepemimpinan dan

kebijakan-kebijakannya. Perpaduan antara konsep kekuasaan Jawa tradisional dan visi modernnya tentang kepemimpinan revolusioner membentuk karakteristik unik dalam sejarah kepresidenan Indonesia.

Pengaruh Konsep Jawa Tentang Kekuasaan Terhadap Sudut Pandang Soekarno Tentang Kebijakan Dalam Negeri

Konsep kekuasaan dalam budaya Jawa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran dan kebijakan Soekarno sebagai pemimpin Indonesia. Dalam pandangan Jawa, kekuasaan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan terpusat pada satu figur pemimpin. Hal ini tercermin dalam gaya kepemimpinan Soekarno yang cenderung sentralistik dan kharismatik. Soekarno, yang dibesarkan dalam lingkungan budaya Jawa, mengadopsi konsep "Ratu Adil" atau raja yang adil dalam pemikirannya. Ia memposisikan dirinya sebagai figur pemimpin yang memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya. Konsep ini mempengaruhi kebijakannya yang sering kali bersifat populis dan bertujuan untuk mendapatkan dukungan massa (Florida & Nancy, 1995). Pandangan Jawa tentang kekuasaan yang absolut dan terpusat juga tercermin dalam kebijakan Soekarno yang cenderung otoriter, terutama pada masa Demokrasi Terpimpin. Ia mengambil peran sentral dalam pengambilan keputusan dan sering kali mengabaikan sistem *checks and balances* dalam pemerintahan.

Konsep Jawa tentang harmoni dan keseimbangan juga mempengaruhi kebijakan Soekarno dalam mengelola perbedaan di Indonesia. Dipengaruhi oleh konsep kekuasaan Jawa di mana seorang pemimpin atau penguasa Jawa harus mampu memusatkan diri pada hal-hal yang berlawanan secara antagonis (Anderson, 1990), Soekarno mencoba memusatkan diri pada hal-hal yang berlawanan secara antagonis dalam politik Indonesia pada masanya. Dalam apa yang disebutnya "Nasakom" (singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme), misalnya, ia mencoba menyatukan oposisi- oposisi politik yang berlawanan dan membuat mereka bekerja sama untuk negara. Pada satu titik Soekarno bahkan menyatakan dirinya sebagai seorang nasionalis, religius, dan komunis sekaligus (Geertz & Clifford, 1960). Bagi Anderson, pernyataan tersebut sangat sesuai dengan konsep kekuasaan politik Jawa, di mana biasanya seorang penguasa memiliki "klaim yang kuat atas kepemilikan kekuasaan (Anderson & Benedict, 1972). Berdasarkan sumber yang diterbitkan dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi* (1964), bahkan sejak tahun 1928, ketika ia masih berusia dua puluhan, Soekarno sudah mempromosikan pentingnya

persatuan bagi Indonesia. Dia menulis, "semangat persatuan Indonesia telah diadopsi di mana-mana. Semangat persatuan Indonesia adalah alasan mengapa tidak ada lagi pertengkaran antara golongan kiri dan golongan kanan" (Soekarno, 1964).

Soekarno sebagai seorang pemimpin yang dipengaruhi oleh konsep kekuasaan Jawa, dan dorongan untuk persatuan juga tercermin dalam penolakannya terhadap sistem pemerintahan federal untuk Indonesia seperti yang diusulkan oleh penjajah Belanda. Dukungan Soekarno terhadap permusuhan rakyat terhadap gagasan Republik Federasi Indonesia (1949-1950) bukan sekadar kecurigaan eksplisit bahwa negara-negara bagiannya adalah boneka ciptaan Belanda. Lebih dari itu, sistem federal dipandang tidak sesuai dengan konsep kekuasaan Jawa yang menyatakan bahwa "kesatuan adalah kekuatan dan keanekaragaman adalah perpecahan dan kelemahan" (Geertz & Hildred, 1961).

Pengaruh konsep Jawa juga tercermin dalam penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi liberal, bersamaan dengan seruannya untuk menempatkan kembali sistem tersebut dengan konsep politiknya sendiri, yaitu "demokrasi terpimpin". Soekarno ingin Indonesia mengadopsi sistem "demokrasi terpimpin", tetapi dia dan dia sendiri yang akan menjadi "pemandu" dan penyedia "kepemimpinan yang kuat" untuk "demokrasi" tersebut. Dengan kata lain, ia ingin memegang kekuasaan tanpa ditentang oleh bawahannya, seperti konsep kekuasaan Jawa tentang penguasa Jawa yang ideal (Moertono, 1968).

Penolakan Soekarno sebagai tanda bahwa Presiden dipengaruhi oleh konsep Jawa yang mengatakan bahwa "kesatuan adalah kekuatan dan keanekaragaman adalah penyebaran dan kelemahan." Bagi Soekarno, memecah Indonesia menjadi beberapa negara bagian yang otonom di mana pemerintah federal hanya memiliki kontrol parsial atas masing-masing negara bagian, hanya akan menyebabkan penyebaran dan kelemahan kekuasaan pusat (Anderson, 1990). Berdasarkan sumber yang diungkapkan dalam buku *Revolusi Belum Selesai* (2014), seruan Soekarno yang kuat dan berulang-ulang untuk "*penyatuan*" wilayah Papua Barat ke Indonesia juga dapat dilihat sebagai hasil dari pengaruh konsep persatuan Jawa pada Soekarno (Soekarno, 2014). Soekarno berkata: "Dibandingkan dengan kepulauan kita, Irian Barat itu hanya sebesar daun *kelor* [artinya tidak seberapa], tetapi Irian Barat adalah bagian dari tubuh kita. Adakah orang yang mengizinkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan

perlawanan? Tidakkah orang akan menjerit kesakitan kalau jari tangannya yang paling kecil saja dipotong?" (Soekarno, 1964).

Menyatukan" Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia merupakan hal yang tidak bisa ditawar bagi Soekarno, dan ia tidak segan-segan memperjuangkan penyatuan tersebut. Ia menuntut penyatuan wilayah tersebut ke dalam wilayah Indonesia melalui Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dan pemerintah Amerika Serikat (AS). Dia berhasil, dan dia senang karena pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat dibebaskan dan dikembalikan ke pangkuan Indonesia (Ricklefs, 2008). Pada kasus yang berbeda namun serupa, atas nama persatuan Indonesia, Soekarno juga menolak pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris. Soekarno mendesak agar rencana pembentukan federasi dibatalkan. Ia khawatir bahwa federasi semacam itu akan menjadi ancaman bagi persatuan Indonesia karena federasi Malaysia tidak akan menjadi "tetangga yang bersahabat" dan akan didukung oleh militer Inggris (Sesana, 2010).

Pandangan Jawa tentang kekuasaan yang bersifat paternalistik juga terlihat dalam gaya kepemimpinan Soekarno. Ia sering memosisikan diri sebagai "Bapak Bangsa" yang memiliki kewajiban untuk membimbing dan melindungi rakyatnya. Hal ini tercermin dalam kebijakannya yang sering bersifat *top-down* dan kurang memberi ruang pada partisipasi publik.

Pengaruh Konsep Jawa Tentang Kekuasaan Terhadap Sudut Pandang Soekarno Tentang Hubungan Internasional

Pada isu hubungan internasional, konsep kekuasaan Jawa mengadopsi konsep India tentang *Mandala* dan *Chakravartin*. Berdasarkan konsep ini, orang Jawa percaya bahwa seorang penguasa Jawa memiliki tugas untuk memperluas *mandala* atau lingkaran kekuasaan dan pengaruhnya di panggung internasional (Dahm, 1969). Tujuan utama dari perluasan tersebut adalah untuk memungkinkan lahirnya pemerintahan dunia di bawah penguasa tunggal atau *chakravartin*. Dengan adanya *chakravartin* yang memimpin pemerintahan dunia, diharapkan konflik antar negara akan tergantikan oleh kolaborasi internasional yang damai.

Dipengaruhi oleh konsep *mandala*, selama kegiatan politiknya dalam perjuangan kemerdekaan, Soekarno tidak pernah berpikir untuk hanya membebaskan pulau Jawa dari kolonialisme. Meskipun ia lahir dan dibesarkan di Jawa, Soekarno ingin memperluas lingkaran kekuasaan dan pengaruhnya di luar Jawa. Oleh karena itu, alih-alih hanya

memerdekakan pulau asalnya, Jawa, Soekarno ingin memerdekakan seluruh wilayah Hindia Belanda (Susetya & Wawan, 2016). Hal ini karena ia membayangkan dirinya sebagai penguasa Jawa. Sebagai penguasa Jawa yang percaya pada konsep *mandala*, ia merasa berkewajiban untuk menjangkau daerah-daerah di luar Jawa.

Terinspirasi oleh konsep yang sama, ketika ia akhirnya menjadi penguasa resmi Indonesia, Soekarno ingin memperluas pengaruhnya di luar Indonesia. Untuk itu, ia mulai menjangkau masyarakat Asia dan Afrika. Hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan konferensi pertama negara-negara Asia dan Afrika di Bandung pada tahun 1955 (Aspinall et al., 1999). Dalam konferensi tersebut, beliau mengumpulkan hampir 30 negara yang baru merdeka dari dua benua untuk bertemu dan memetakan masa depan bersama.

Pada pandangan Soekarno, di bawah kepemimpinan Indonesia, bangsa-bangsa di Asia dan Afrika tidak hanya dapat menjalin persahabatan di antara mereka sendiri, tetapi juga mengubah seluruh dunia menjadi lebih baik. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa konferensi tersebut mempresentasikan berbagai prinsip untuk memajukan perdamaian dunia dan kerja sama, di mana prinsip tersebut mengikuti konsep *mandala* dan *cakravartin*. Lebih jauh lagi, Soekarno juga tertarik untuk menghubungkan dirinya dengan para pemimpin dunia dari kedua belah pihak dalam Perang Dingin, negara-negara Barat dan juga negara-negara Sosialis. Dia pergi dan mengunjungi banyak negara, dan berkat kunjungan internasional ini, dia menjadi tokoh politik Dunia Ketiga yang menarik perhatian dunia. Ia memikat dunia sebagaimana Presiden Kuba Fidel Castro dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy (Soekarno, 2014).

Soekarno juga suka mengundang para pemimpin ini untuk datang dan mengunjungi Indonesia. Selain mengundang banyak kepala negara Asia dan Afrika untuk datang ke Indonesia pada tahun 1955 untuk menghadiri Konferensi Bandung, pada tahun 1960, ia juga mengundang Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev untuk mengunjunginya. Khrushchev datang dan menghabiskan waktu selama dua minggu (18 Februari-1 Maret 1960) di Indonesia (Crankshaw, 1971).

Soekarno juga sangat senang dengan liputan media yang diterimanya selama kunjungan Khrushchev. "Ketika Khrushchev berada di sini," katanya dengan bangga, "100 wartawan asing berkerumun di mana-mana, terus menerus mengerumuni saya" (Soekarno, 1965, hlm. 14). Soekarno juga merasa senang bahwa ketika ia mengunjungi Moskow, lebih dari seratus musisi memainkan lagu *Indonesia Raya*, lagu kebangsaan *Indonesia*, untuk menyambutnya. "Ini membuat air mata kebanggaan saya menetes di

mata saya bahwa tanah air kita telah sampai pada titik ini," kata Soekarno (Soekarno, 1965).

Selain Khrushchev, Soekarno juga mengundang Presiden AS John F. Kennedy untuk mengunjunginya di Indonesia. Soekarno sangat senang ketika pada akhir tahun 1963 Kennedy berjanji untuk mengunjunginya pada musim semi 1964. Presiden Indonesia bahkan membuat rencana untuk membangun sebuah wisma khusus untuk Presiden Amerika. "Saya sangat gembira sehingga saya menugaskan tim arsitek dan insinyur untuk menyiapkan sebuah wisma khusus untuknya di halaman istana," katanya (Soekarno, 1965).

Pada bulan Juli 1961, sebagai balasan atas hubungan baik Soekarno dengan Kennedy, Presiden Amerika tersebut mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno, mengundang putra Soekarno, Guntur, untuk belajar di Amerika Serikat. Sayangnya, Kennedy tidak pernah dapat memenuhi janjinya untuk mengunjungi Indonesia. Pada bulan November 1963, ia dibunuh. Namun, Soekarno selalu bangga pada dirinya sendiri karena dapat membangun persahabatan dengan Kennedy, yang merupakan pemimpin de facto dari blok Barat dalam Perang Dingin (Adams & Cindy, 1966).

Bentuk cerminan dari pengaruh konsep *cakravartin* atau pemerintahan dunia di bawah pemimpin tunggal dari konsep kekuasaan Jawa, Soekarno berharap PBB akan bekerja untuk merealisasikan konsep perdamaian kepada PBB (Agung, 1990). Tidak lama setelah itu Indonesia secara resmi menjadi negara kesatuan, pada bulan September 1950, Soekarno memutuskan bahwa Indonesia harus bergabung dengan PBB. Indonesia kemudian menjadi anggota ke-60 PBB, di bawah sponsor India (Farram, 2024). Soekarno ingat, selama perang revolusi antara Indonesia dan Belanda, melalui *Committee of Good Offices*, PBB telah mencoba menengahi kedua belah pihak yang bertikai (Soyomukti, 2002).

Soekarno sebagai pemimpin negara anggota PBB, berusaha mendorong badan dunia tersebut untuk menjadi pemerintahan dunia dan melindungi serta melayani semua bangsa di dunia dengan berpedoman pada prinsip-prinsip universal yang sama. Untuk itu, ketika memberikan pidato berjudul "*To Build the World Anew*", di hadapan badan dunia tersebut pada bulan September 1960, Soekarno memperkenalkan Pancasila (Dewi, 2017). Dia berharap bahwa ideologi negara Indonesia akan menjadi inspirasi tidak hanya bagi negara-negara lain tetapi juga bagi PBB sendiri dalam menciptakan perdamaian dan kerja sama di antara semua bangsa.

Terbukti bahwa di bawah pengaruh konsep *cakravartin*, Soekarno tidak hanya ingin memiliki kekuasaan atau pengaruh atas Jawa atau Indonesia, tetapi juga atas dunia secara umum. Peneliti menunjukkan bahwa ambisi Soekarno ini sejalan dengan keinginan global dalam konsep kekuasaan Jawa, seperti yang tercermin dalam nama-nama kerajaan Jawa seperti *Paku Buwana*, *Hamengku Buwana*, dan *Paku Alam*, di mana kata *buwana* berarti jagat raya dan *alam* merujuk pada seluruh dunia alam (Anderson, 1990). Status yang diberikan kepada penguasa Jawa melalui nama-nama tersebut mencerminkan konsep Jawa tentang penguasa dunia yang disebut *prabu murbeng wisesa anyakrawati* (Nugroho, 2011) yang mungkin juga dianut oleh Soekarno.

Analisis Bukti Pengaruh Konsep Politik Jawa Terhadap Soekarno

Peneliti dapat dengan jelas melihat pandangan pribadi Soekarno mengenai dirinya dan karir politiknya. Soekarno sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang konsep kekuasaan Jawa. Akan tetapi, implementasi dari pemahaman tersebut tidaklah statis. Pemahaman tersebut sangat dinamis dan dapat dengan mudah diamati dari kehidupan pribadinya, pelaksanaan politik dalam negeri, dan juga kebijakan-kebijakannya yang berkaitan dengan hubungan internasional. Dinamika tersebut terutama terekspresikan dengan baik dalam bagaimana Soekarno merespons gejolak politik dalam negeri dan internasional, serta peran yang ingin ia mainkan di tengah gejolak tersebut.

Selama periode sebelum tahun 1945, misalnya, di mana ia bekerja untuk menghapuskan penjajahan kolonial, Soekarno menerapkan konsep kekuasaan Jawa dengan memandang dirinya sebagai pemimpin masa depan Jawa sebagaimana para pendahulunya (Robert, 1969). Dalam politik dalam negeri, ia memandang kolonialisme sebagai penghalang bagi orang Jawa untuk memiliki pemerintahan sendiri, dan oleh karena itu harus diakhiri. Dalam hal hubungan internasional selama periode ini, ia memandang pulau-pulau selain Jawa sebagai "tanah asing" yang harus dimasukkan ke dalam kekuasaan Jawa (Nitisastro, 1970).

Selama periode Demokrasi Liberal (1950-1957), Soekarno secara pribadi bersedia untuk berbagi kekuasaan politik dengan orang lain, banyak di antaranya adalah orang non-Jawa. Pada periode ini, sebagai presiden, ia juga bersedia membatasi kekuasaannya hanya sebagai kepala negara dari negara yang baru saja merdeka, dan membiarkan perdana menteri menjadi kepala pemerintahan. Dalam kapasitasnya

sebagai kepala negara Indonesia, ia mengimplementasikan konsep *Mandala* dan *Chakravartin* di antara negara-negara Asia dan Afrika, seperti yang ditunjukkan dalam penyelenggaraannya yang sukses dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 (Dewi, 2017).

KESIMPULAN

Konsep politik Jawa memiliki akar yang dalam pada budaya dan filosofi tradisional Jawa. Pandangan dunia Jawa menekankan harmoni, keseimbangan, dan hierarki dalam tatanan sosial dan politik. Konsep-konsep seperti kekuasaan yang terpusat, sentralisme, dan kepemimpinan karismatik memainkan peran penting dalam pemikiran politik Jawa. Soekarno, sebagai putra Jawa, sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep politik ini. Ia menggabungkan elemen-elemen tradisional Jawa dengan ide-ide modern tentang nasionalisme dan sosialisme. Gaya kepemimpinannya yang karismatik dan cenderung otokratis mencerminkan pandangan Jawa tentang pemimpin sebagai figur sentral yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan.

Konsep kekuasaan dalam pemikiran Jawa, yang sering digambarkan sebagai "keris yang menyatu dengan sarungnya", tercermin dalam upaya Soekarno untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang beragam. Ia berusaha menjadi pemimpin yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan dan ideologi yang ada di Indonesia. Pandangan Jawa tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang sakral dan absolut mempengaruhi sikap Soekarno terhadap oposisi politik. Ia cenderung melihat kritik dan perbedaan pendapat sebagai ancaman terhadap kesatuan dan stabilitas negara, yang sejalan dengan konsep Jawa tentang harmoni sosial.

Soekarno juga mengadopsi konsep Jawa tentang pemimpin sebagai "poros" atau pusat dari kehidupan politik dan sosial. Hal ini terlihat dalam kebijakan-kebijakannya yang cenderung sentralistik dan penekanannya pada peran dirinya sebagai "Pemimpin Besar Revolusi". Filosofi Jawa tentang keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang bertentangan tercermin dalam upaya Soekarno untuk menyeimbangkan berbagai kekuatan politik di Indonesia, seperti dalam konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Ini menunjukkan pengaruh pemikiran Jawa tentang harmoni dalam keberagaman.

Konsep Jawa tentang kekuasaan yang memancar dari pusat ke pinggiran juga mempengaruhi gaya pemerintahan Soekarno. Ia melihat dirinya sebagai sumber

kekuasaan dan legitimasi, yang kemudian didistribusikan ke seluruh negeri, mirip dengan konsep tradisional kerajaan Jawa. Meskipun Soekarno juga dipengaruhi oleh ide-ide modern dan global, pengaruh konsep politik Jawa tetap kuat dalam pemikiran dan praktik politiknya. Hal ini menciptakan suatu sintesis unik antara tradisi dan modernitas dalam kepemimpinannya, yang membentuk lanskap politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. (1966). *Bung Karno Penjambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Agung, I. A. A. G. (1990). *Twenty Years of Indonesian Foreign Relations, 1945-1965 (First)*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Anderson, B. R. O. (1990). *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. London: Cornell University Press.
- Anderson, B. R. O., & Benedict, C. (1972). "The Idea of Power in Javanese Culture," dalam *Culture and Politics in Indonesia*, ed. Claire Holt. London: Cornell University Press.
- Aspinall, E., Feith, H., & Klinken, G., (1999). *The Last Days of President Suharto*. Melbourne: Monash Asia Institute.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 10(2), 45–60.
- Carey, A. (1976). *The origins of the Java War*. London: English Historical Review.
- Crankshaw, E. (1971). *Khrushchev Remembers*. New York: Bantam.
- Dahm, B. (1969). *Soekarno and the Struggle for Indonesian Independence (First)*. Cornell London: University Press.
- Dewi, K. H. (2017). Pegangkatan putri mahkota dan indikasi pergeseran konsep kuasa Jawa: Analisis Pendahuluan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 19(1), 59–76.
- Farram. (2024). Pahlawan, Pengkhianat, Atau Penjahat (Hero, Traitor, or Villain): A Personal Journey Through Indonesian History. *Cogitatio: Journal Politics and Governance*, 12(1), 13–26.
- Florida, N. (1995). *Writing the Past, Inscribing the Future: History As Prophecy in Colonial Java*. Duke Durham: University Press.
- Franklin, N., & Hägerdal, H. (2024). Indonesian Heroes and Villains: National Identity, Politics, Law, and Security. *Cogitatio: Journal Politics and Governance*, 12(1), 1–8.
- Geertz, C., & Clifford, T. (1960). *The Religion of Java*. London: The Free Press of Glencoe.
- Geertz, C., & Hildred, D. (1961). *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*. London: The Free Press of Glencoe Inc.
- Hindley, D. (2013). *President Sukarno and the Communists: The Politics of Domestication*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Moertono, S. (1968). *State and Statecraft in Old Java*. London: Cornell University Press.
- Mulyana, A. (2017). *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LkiS.
- Nitisastro, W. (1970). *Population Trends in Indonesia*. London: Cornell University Press.
- Nugroho, N. (2011). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C., (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Robert, R. (1969). *Javanese Villagers: Social Relations in Rural Modjokuto*. Cambridge: The MIT Press.

- Safitri, I. (2019). Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja Jawa dan Politik Wacana "Raja Perempuan." *Indonesian Historical Studies*, 3(1), 44–57.
- Sesana, R. (2010). *Intrik politik dan pergantian tahta di Kasultanan Yogyakarta 1877-1921*. Depok: Indonesia University Press.
- Soekarno. (1964). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Dabara.
- Soekarno. (1965). *An Autobiography as Told to Cindy Adams*. Jakarta: The Bobbs-Merill Company.
- Soekarno. (2014). *Revolusi Belum Selesai Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Soyomukti, M. (2002). *Soekarno dan Cina*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Susetya, & Wawan. (2016). *Pemimpin Masa Kini & Budaya Jawa: Menghidupkan Kembali Nilai-Nilai Kepribadian dan Kepemimpinan dalam Perspektif Jawa*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan (Pertama)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.